

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
1.	Proses Penyerapan APBD tahun 2017 SKPD dan PPKD	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31	Proses pengawasan keuangan oleh Inspektorat Pemprov. Jawa Timur dan BPK	Otentik data pengelolaan anggaran	Sampai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2-15 oleh BPK dikeluarkan oleh BPK.
2.	Proses Penawaran Harga Satuan Lelang Barang dan Jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Menjaga data penawaran peserta lelang terkait dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.	Persaingan usaha yang sehat	Permanen
3.	IP Address Privat	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Keamanan sistem aplikasi dan data	Permanen
4.	Data SP2D Pihak Ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
5.	Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK

		31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	terhadap informasi dimata publik		
6.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Perlindungan usaha	Permanen
7.	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrakpengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak 2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Perlindungan usaha	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak Sampai dengan penyerahan berkas
8.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
9.	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 g dan h 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Infomasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
10.	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	
11.	Source Kode Aplikasi Khusus	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen

		Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016			
12.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
13.	Hasil Audit keamanan Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
14.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi Informasi dari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen
15.	Persandian, kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi, aktifitas informasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi			Keamanan data strategis	
16.	Catatan Medis/Rekam Medis	1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008	1. Menyangkut masalah privacy 2. Kemungkinan Penyalahgunaan informasi	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. Relevan, Kepentingan penyediaan pihak yang	Permanen

				berwajib	
17.	Bio Data Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. UU No 23 Thn 2006 ttg administrasi kependudukan psl 85 ayat 3 3. UU No 24 thn 2014 ttg perubahan atas UU no 23 thn 2006 ttg adminitrasi kependudukan pasal 84 ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi 	Melindungi perserorangan	Permanen
18.	Data Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No 5 Thn 2014 ttg ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
19.	Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 14 thn 2008 ttg KIP Pasl 17 huruf b dan j 2. KUH Perdata , pasal 1338 jo Perpres No. 54 Thn 2010 ttg pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasl 35 huruf b 	Persaingan Usaha yang tidak sehat / competitor		Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan
20.	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j 2. UU no 8 Thn 1981 TtgHukum Acara Pidana pasal 322 3. UU No 43 Thn 2009 Ttg Kearsiapan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan 	<p>Relevan, kecuali utuk kepentingan penegakan hukum</p> <p>Menjaga keakuratan data pemeriksaan</p> <p>Selama dalam proses lelang /pengadaan sebelum diumumkan</p> <p>Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang</p>	Sampai LHKPN ditetapkan

21.	Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No 14 Tahun 2008 Ttg KIP pasal 6 3. UU No 13 Thn 2006 Ttg Perlindungan Saksi dan Korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manyangkut Privacy 2. Mengganggu Proses penyelidikan/pengawasan 	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
-----	---	---	---	-----------------------------------	--------------------------------------

Surabaya, 15 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Selaku
Ketua PPID Provinsi Jawa Timur



Ir. EDDY SANTOSO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580927-198701 1 002